



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah menguasai hampir di semua aspek kehidupan. Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, relevan dan fleksibel membuat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dengan sangat pesat. Sehingga diharapkan dengan kehadiran teknologi tersebut akan membantu dalam hal pencapaian target dari perusahaan atau instansi pemerintahan.

Perusahaan atau instansi pemerintahan dalam hal ini khususnya yaitu, Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Ciracas, menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta no. 29 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah Bab III Pasal 3 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Rokok.

Beberapa tugas umum UPPD yaitu:

- 1) Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah;
- 2) Pendaftaran, pengukuhan dan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah;
- 3) Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPPD menemui beberapa kendala berkaitan dengan sistem yang masih manual, Pertama, sulitnya Pemantauan proses atau alur data BPHTB Wajib Pajak setiap harinya yang ingin di validasi oleh pimpinan dan staff, Kedua, belum sesuai nilai Perhitungan BPHTB seperti Luas tanah dan bangunan, NJOP tanah dan bangunan yang di Isikan oleh wajib pajak, dalam Pemantauan proses atau alur data BPHTB untuk di validasi sangatlah tidak terkontrol jadi terkadang setiap staff dan karyawan akan kebingungan dengan data wajib pajak siapa saja yang sudah di validasi atau data tersebut akan di lanjutkan untuk di tangani oleh pihak lapangan atau tidak, atau sudah sampai di tangan siapa data tersebut telah di proses, kedua, penetapan nilai nilai Perhitungan BPHTB yang kurang sesuai dari wajib pajak tuliskan dengan kondisi asli dari lokasi rumah atau lahan, sehingga staff dan karyawan seringkali memberikan pelayanan yang tidak optimal terhadap para Wajib Pajak.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah user atau pihak pelayanan dan staff-staff terkait dalam mengelola data dan menyajikannya dalam bentuk informasi sehingga dapat membantu mempercepat pekerjaan mereka. Proses ini akan dijadikan sebagai sebuah penelitian yang mengangkat tema sistem informasi dengan judul “Analisis dan Perancangan Sistem *Monitoring* Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Ciracas Jakarta Timur”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti menganalisa dan mengidentifikasi sebagai berikut:

- Sulitnya pemantauan data oleh pihak pimpinan dan staff
- Belum sesuainya nilai perhitungan BPHTB oleh wajib pajak dengan kondisi di lokasi
- Sulitnya Mencari data Wajib Pajak
- Data wajib pajak yang di bawa ke lokasi untuk ditinjau kurang tertata dengan baik
- Lamanya proses Validasi Data BPHTB wajib pajak

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Sulitnya pemantauan data oleh pihak pimpinan dan staff
- Belum sesuainya nilai perhitungan BPHTB oleh wajib pajak dengan kondisi di lokasi
- Sulitnya Mencari data Wajib Pajak
- Data wajib pajak yang di bawa ke lokasi untuk ditinjau kurang tertata dengan baik
- Lamanya proses Validasi Data BPHTB wajib pajak

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Mempermudah Terpantaunya Data Wajib Pajak yang sedang atau belum di tangani
- Memastikan Nilai Perhitungan BPHTB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Mempermudah Staff dan Karyawan mencari data Wajib Pajak
4. Terorganisirnya penanganan pelaksana ke lokasi objek pajak
5. Mempercepat Pemrosesan Validasi Data BPHTB

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pihak Unit Pelayanan Pajak

Salah satu cara mengoptimalkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak dan membantu pelayanan pajak supaya lebih efektif.

2. Penulis

Sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

3. Pembaca

Hasil pembuatan sistem ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan dan menambah minat para pembaca sebagai referensi pengembangan sistem pajak.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.